SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

OLEH :

LISA PRATIWI
220412014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

2026

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

LISA PRATIWI

220412014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

2026

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh :

LISA PRATIWI
220412014

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Komisi Pembimbing

Taluk Kuantan, 15 September 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Diskhamarzaweny, SE., MM	Yeni Sapridawati, SE., M.AK
NIDN. 1012038701	NIDN. 1011019002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Yeni Sapridawati, SE., M.AK
NIDN. 1011019002

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh :

LISA PRATIWI
220412014

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada tanggal 21 September 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

NO.	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Irwan, SE.,MM	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Yeni Sapridawati, SE.,M.Ak	Sekretaris/Pembimbing 2	2.
3.	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Pembimbing 1 / Anggota 1	3.
4.	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Rina Andriani, SE.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial

Sarjan M.Sos., M.Si
NIDN.1008128002

Ketua
Program Studi Akuntansi

Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
NIDN. 1011019002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: LISA PRATIWI
NPM	: 220412014
Program Studi	: AKUNTANSI
Fakultas	: ILMU SOSIAL

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **"ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI."** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 9UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Teluk Kuantan, 15 September 2026



LISA PRATIWI
220412007

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

‘ Rencana dibumi, bertawakal kepada langit”

(QS.al-baqarah 286)

“Langkahku yang kecil, pertolongan Allah yang sangat besar”

“Setiap gelap, pasti ada fajar, setelah sulit, pasti ada mudah”

(QS. Al-insyirah:5)

“Bersabarlah, Allah sedang menyiapkan kejutan terbaik untukmu’

“Sedikit syukur, banyak nikmat, sedikit sabar banyak jalan’

“Hasbunallah wa ni’mal wakil. Cukup Allah menjadi penolong”

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT.

“Rencana dibumi, bertawakal kepada langit” kalimat inilah yang menguatkan saya hingga dititik ini. Shalawat untuk Rasulullah SAW. Dengan setulus hati, karya ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu. Terimakasih karena sudah mengajarkan saya bahwa ‘setiap gelap pasti ada fajar” . Setelah sulit pasti ada mudah’. Terima kasih sudah menjadi rumah pertama saya belajar “Sedikit syukur, banyak nikmat” dan “Sedikit sabar, banyak jalan”. Do’a peluk, dan “Hasbunallah wa ni’mal wakil” dari kalian adalah pertolongan Allah yang sangat besar dalam langkah kecil saya ini. Semoga Allah membalas cinta kalian berlipat-lipat. Amiiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sehingga dapat menyelesaikan penulisan usulan proposal skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan SingingI” ini dengan baik. Oleh karena itu,dalam kesempatan ini penulis sangat berterimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani,S.Pd.I.,M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Sarjan M, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu SosialUversitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Yeni Sapridawati, SE., M. Ak** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu **Diskhamarzaweny, SE.,MM** selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Yeni Sapridawati, SE., M. Ak** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.

7. Kedua Orang Tua Ayah **Untung Musdi** dan Ibu **Butet (Almh)** yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara kandung penulis **Doris Prayoga** dan **Novalindo Pramudia** yang telah memberikan motivasi dan saran kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2022 yang telah menjadi penyemangat dan sumber inspirasi dalam penyusunan proposal ini.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan proposal ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Terakhir, harapan penulis, semoga usulan proposal ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Teluk Kuantan, 04 Januari 2026

Penulis.

LISA PRATIWI

NPM. 220412014

ABSTRAK
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

LISA PRATIWI
DISKHAMARZAWENY
YENI SAPRIDAWATI

Penerapan teknologi informasi dalam sektor publik menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Keuangan yang meliputi aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan empat pegawai pengelola keuangan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, serta diperkuat melalui observasi langsung dan analisis dokumentasi. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD pada Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi telah berjalan terstruktur dan membuat proses pengelolaan anggaran menjadi lebih terarah, transparan, serta data keuangan lebih mudah ditelusuri dibandingkan mekanisme sebelumnya. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain hambatan teknis akibat server pusat yang sering melambat (down), proses adaptasi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) khususnya pegawai senior yang belum terbiasa dengan komputerisasi, serta tingginya kebutuhan waktu untuk pemeriksaan dan koreksi data saat terjadi perubahan anggaran dalam jumlah besar. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendampingan atau pelatihan berkala serta peningkatan ketelitian dalam proses penginputan data anggaran.

Kata kunci : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM (SIPD) AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION AGENCY OF KUANTAN SINGINGI

LISA PRATIWI
DISKHAMARZAWENY
YENI SAPRIDAWATI

The implementation of information technology in the public sector has become an essential instrument for achieving good governance, particularly in local financial management. This study aims to analyze the implementation of the Local Government Information System (SIPD) for Finance, which encompasses budget planning, execution and administration, accounting and reporting, as well as accountability for local financial execution at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Kuantan Singingi Regency, while also identifying the constraints faced during its execution. A descriptive qualitative research approach was employed in this study. Data collection was conducted through semi-structured interviews with four financial management employees selected via purposive sampling, complemented by direct observation and documentation analysis. Data validity was verified using data source triangulation. The results indicate that the implementation of SIPD at the Disdukcapil of Kuantan Singingi Regency has been structured and has made the budget management process more directed, transparent, and easier to trace compared to the previous mechanism. Nonetheless, its implementation still encounters several obstacles, including technical glitches caused by the central server frequently slowing down or crashing, adaptation and human resource capacity challenges-particularly among senior employees unaccustomed to the new computerized system-and the substantial time required for checking and correcting data when large-scale budget changes occur. This study suggests the necessity of enhancing employee competencies through routine mentoring or training and increasing precision during the financial data entry process.

Keywords : Local Government Information System (SIPD), Local Financial Management, Department of Population and Civil Registration

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
MOTTO
KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iii
ABSTRACK iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.4.1 Manfaat Teoritis 6
1.4.2 Manfaat Praktis 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Sistem Informasi 8
2.1.1 Definisi Sistem Informasi 8
2.1.2 Manfaat dan Kualitas Informasi 8
2.2 Sistem Informasi Manajemen 10
2.2.1 Definisi Sistem Informasi manajemen 10
2.2.2 Tugas Sistem Informasi Manajemen 11
2.2.3 Fungsi Sistem Informasi Manajemen 12
2.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 12
2.3.1 Definisi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 12
2.3.2 Ruang Lingkup SIPD 14
2.3.3 Fungsi Program Aplikasi SIPD 14
2.3.4 Manfaat SIPD Keuangan 15
2.3.5 Unsur SIPD Keuangan 16
2.4 Penelitian Terdahulu 17
2.5 Kerangka Pemikiran 21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 22
3.1 Rancangan Penelitian 22

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 22
3.2.1 Tempat Penelitian 22
3.2.2 Waktu Penelitian 22
3.3 Populasi dan Sampel 23
3.3.1 Populasi 23
3.3.2 Sampel 23
3.4 Jenis dan Sumber Data 24
3.4.1 Jenis Data 24
3.4.2 Sumber Data 24
3.5 Teknik Pengumpulan Data 25
3.6 Teknik Analisis Data 26
3.7 Pengecekkan Validasi Data 26
3.8 Tahap-tahap Penelitan 27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 17

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 23

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 21

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi..... 32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi

Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Lampiran 3. Surat Balasan Riset

Lampiran 4. Catatan Bimbingan Proposal dan Skripsi

Lampiran 5. Lembar Persetujuan Pembimbing untuk reivisi Proposal

Lampiran 6. Lembar Persetujuan Pembimbing untuk reivisi Skripsi

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi saat ini sudah banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Teknologi informasi menyampaikan banyak sekali keringanan untuk mendapatkan informasi, menolong menuntaskan kesibukan serta menyampaikan pelayanan yang maksimal pada pengguna. Salah satu produk teknologi informasi yang dipergunakan oleh banyak institusi baik swasta, pemerintahan maupun dalam bidang pendidikan yaitu sistem informasi. Sistem informasi ialah kombinasi dari empat bagian primer yang meliputi aplikasi, perangkat keras, infrastruktur dan sumber daya terlatih (Arya S:2022). Penggunaan sistem informasi membantu pada aktivitas operasional instansi karena dengan adanya sistem informasi membuat data serta informasi yang diperlukan lebih mudah dihasilkan.

Perkembangan teknologi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah ini diharapkan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Bergulirnya UU No.22/1999 yang diperbarui dengan UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.25/1999 yang diperbarui dengan UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan dasar hukum pemerintah daerah mengenai desain dan pola-pola

aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan negara (Nur:2023).

Sistem informasi serta teknologi menjadi sangat penting untuk era saat ini sehingga dapat berperan luas tidak terkecuali bagi organisasi lingkup pemerintahan atau sektor publik. Salah satu lingkupnya yaitu pemerintah daerah. Perkembangan pada sistem teknologi sektor publik, khususnya di Indonesia begitu pesat, hal itu dapat kita lihat dari adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan itu sendiri, dapat membantu proses bisnis dan kegiatan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, komunikasi serta kolaborasi (Aulia: 2021).

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengelolaan data keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu sistem dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun. Peningkatan volume kuantitas transaksi tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerahnya (Irmayani N: 2017).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut: "Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik."

Efektivitas penerapan sistem informasi merupakan hasil yang diperoleh dari suatu instansi mencerminkan sejauh mana instansi tersebut mampu menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintah yang baik dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi. Sistem informasi merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kriteria dari sistem informasi antara lain, fleksibel, efektif dan efisien (Nafischa E.N:2021).

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah direalisasikan dalam bentuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Keuangan. SIPD merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang menggantikan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang sebelumnya digunakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia (Zulfikar F.A:2022).

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai alat bantu dalam pengelolaan data dan informasi pemerintahan. SIPD dirancang untuk membantu instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Penerapan SIPD diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja pegawai serta mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kuantan Singingi No. 04 Tahun 2008 dan keputusan Bupati Kuantan Singingi No. 22 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dimana tugas pokoknya adalah kewenangan otonomi daerah di bidang Kependudukan Pencatatan Sipil di daerah.

Berikut jenis-jenis pelayanan yang ada di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut:

1. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
2. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
3. Surat pindah
4. Kartu Identitas Anak (KIA)

5. Pembuatan kutipan akta kelahiran
6. Kutipan akta kematian
7. Kutipan akta perceraian
8. Pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak
9. Pencatatan perubahan nama
10. Pencatatan perubahan kewarganegaraan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu perangkat daerah kini telah beralih menggunakan SIPD dalam mendukung aktivitas administrasi dan pengelolaan data, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh OPD untuk menggunakan SIPD menggantikan SIMDA. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan sistem informasi seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem, serta kendala teknis yang dapat menghambat optimalisasi sistem (Mulyadi,2016). Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas penerapan SIPD dalam mendukung pelayanan publik.

Penelitian ini merupakan acuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Amri (2022). Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitiannya. Penelitian Zulfikar berlokasi di Kecamatan Semarang Timur, sedangkan penelitian ini berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi".**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang meliputi Perencanaan Anggaran Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan SIPD Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi di bidang sistem informasi manajemen, khususnya mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada instansi pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan penerapan SIPD Keuangan.
2. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan sistem informasi pemerintah daerah.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

2.1.1 Definisi Sistem Informasi

Sistem informasi adalah serangkaian komponen-komponen yang mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, menyebarkan data dan informasi serta menyediakan suatu mekanisme timbal balik untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi adalah suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manjerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakaan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Sri Yuli Y: 2019).

Menurut Tata Sutabri (2016) sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungis operasi organisasi, manajemen dan proses pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Saa'dillah (2016) sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi, serta menjelaskan bahwa unsur-unsur yang mewakili suatu sistem informasi secara umum adalah masukan (*input*), pengolahan (*processing*) dan keluaran (*output*).

2.1.2 Manfaat dan Kualitas Informasi

1. Manfaat Informasi

Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikan manfaat kepada para penggunanya. Adapun manfaat dari informasi itu sendiri adalah :

1. Menambah pengetahuan. Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Mengurangi ketidak pastian pemakai informasi. Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya.
3. Mengurangi risiko kegagalan. Adanya informasi dapat mengurangi risiko kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan terjadi kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.
4. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan. Informasi akan menghasilkan keputusan yang terarah, sehingga mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan.
5. Memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran berdasarkan informasi yang diperoleh.

2. Kualitas Informasi

Nilai informasi ditentukan oleh banyak hal, di antaranya adalah dengan melihat kualitas informasi yang dihasilkan. Menurut (Nafischa E.N:2021) bahwa mengukur kualitas informasi dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam karakteristik, yaitu :

a. Akurasi (*accuracy*), Informasi dikatakan akurasi yaitu informasi harus jelas mencerminkan maksud yang disampaikan dan harus bebas dari kesalahan-kesalahan.
b. Ketepatan waktu (*timelines*) Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat (usang). Informasi

yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan.

c. Relevan (*relevance*) Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Informasi akan relevan jika memberikan manfaat bagi pemakainya.

2.2 Sistem Informasi Manajemen

2.2.1 Definisi Sistem Informasi manajemen

Sistem informasi manajemen dibentuk oleh tiga kata, yaitu sistem, informasi dan manajemen. Sistem adalah “kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama”. Informasi adalah “hasil pengelolaan data yang memberikan arti dan manfaat”. Manajemen didefinisikan sebagai “suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi” (Irmayani N:2017).

Sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama”. Sistem informasi manajemen adalah penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen (Irmayani N:2017).

Sistem informasi manajemen (SIM) adalah sekumpulan atau sekelompok proses untuk mengolah data, menganalisis dan menampilkan data sehingga memiliki makna dan berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. SIM juga sangat bemanfaat dalam mendukung manajemen dalam mengambil keputusan dalam mengendalikan kegiatan perusahaan. Tujuan utama dari SIM ini adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mengolah data tersebut sehingga menghasilkan suatu informasi untuk memudahkan pihak

manajemen dalam meningkatkan kualitas keputusan yang diambil guna meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan (Nur Aulia R:2023).

2.2.2 Tugas Sistem Informasi Manajemen

a. Pengumpulan Data

   Bagian pengumpul data bertugas untuk mengumpulkan data baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Pihak dalam perusahaan yang menjalankan tugas ini diambil dari seluruh unit kerja yang ada dalam organisasi, sehingga setiap unit kerja terwakili dalam sim.

b. Penyimpanan Data

   Data yang terkumpul selanjutnya disimpan untuk segera di proses atau ditunda pemrosesannya, tergantung kebutuhan para manajer.

c. Pemprosesan Data

   Pemprosesan data dapat dilakukan oleh satu atau beberapa ahli. Bila datanya terlalu banyak, jasa dari tenaga-tenaga pengumpul dan insidential dapat dimanfaatkan, bagian inilah yang membuat data itu berubah bentuk menjadi informasi yang disesuaikan dengan permintaan manajer

d. Pemprograman Data

   Setiap komputer memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Agar komputer dapat melaksanakan tugasnya, maka perintah-perintah terhadap data yang terkumpul harus diubah terlebih dahulu sesuai dengan bahasa yang digunakan. Pekerjaan inilah yang disebut pemprograman, yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ahli dibidang komputer.

2.2.3 Fungsi Sistem Informasi Manajemen

a. Meningkatkan aksebilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengahruskan adanya perantara sistem informasi.
b. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
c. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.
d. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
e. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.
f. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomi dari sistem informasi dan teknologi baru.
g. Memperbaiki produktifitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem.
h. Mengolah transaksi-transaksi, mmengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka.

2.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

2.3.1 Definisi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Sistem ini menggantikan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang sebelumnya dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Zulfikar F.A., 2022).

mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing Menurut Dione dan Utami (2020), sistem informasi SIPD dapat digunakan untuk -masing instansi pemerintah. Selain itu, fungsi SIPD sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah, mengevaluasi program-program pembangunan, dan sekaligus mengevaluasi capaian-capaian pembangunan.

Berdasarkan pengertian SIPD yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa SIPD merupakan sistem informasi yang dapat membantu dalam penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi data dan informasi pembangunan daerah secara elektronik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara nasional. SIPD memiliki fungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, real time dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien.

Alat ukur SIPD merupakan sebuah skala yang digunakan untuk mengukur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. SIPD sebagai program aplikasi ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

2.3.2 Ruang Lingkup SIPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, ruang lingkup SIPD meliputi:

1. Informasi Pembangunan Daerah. SIPD mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait, meliputi kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.
2. Informasi Keuangan Daerah. SIPD mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi, yang meliputi: Perencanaan Anggaran Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah.
3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya. SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, seperti Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Peraturan Daerah (PERDA), dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.

2.3.3 Fungsi Program Aplikasi SIPD

Berikut beberapa fungsi aplikasi SIPD Keuangan:

1. Membantu pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban).
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat.

3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan.
5. Mempermudah proses audit bagi auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit.
6. Mendukung integrasi pemanfaatan data terkait perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.
7. Berfungsi sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

2.3.4 Manfaat SIPD Keuangan

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan SIPD Keuangan (Zulfikar F.A:2022) adalah sebagai berikut:

1. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama.
2. Data yang sama akan tercetak dan recek secara otomatis (validasi data aman).
3. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai kebutuhan dimana output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/kebijakan.
4. Sesuai Peraturan. Dengan menerapkan aplikasi SIPD Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

5. Terintegrasi. SIPD merupakan program aplikasi keuangan daerah yang mengintegrasikan tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
6. Akuntabilitas Publik. SIPD memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah dan capaian-capaian pembangunan daerah secara transparan.

Adapun keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan SIPD Keuangan adalah:

1. Output/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Berbasis web (online), sehingga memudahkan akses dari berbagai lokasi secara real time.
3. Validasi inputan data lebih terjamin.
4. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi.
5. Memfasilitasi akuntansi penggunaan anggaran.

2.3.5 Unsur SIPD Keuangan

Ruang lingkup dan arsitektur SIPD terdiri dari beberapa unsur pokok (Permendagri No. 70 Tahun 2019), yaitu:

1. Akses, melalui jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.

2. Portal, pelayanan publik berupa situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi, yaitu organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar, yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

Output yang dihasilkan dari SIPD Keuangan adalah:

1. Penganggaran: Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana (SPD).
2. Penatausahaan: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), Register, Surat pengendalian lainnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi dasar dari penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zulfikar Fikri Amri (2022)	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat indikator implementasi SIPD

		Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan (Studi Kasus Kecamatan Semarang Timur)	(komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) telah berjalan baik, kecuali pada aspek sumber daya terdapat kendala ketersediaan dan akurasi data pendukung. Kualitas laporan keuangan telah memenuhi indikator relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
2	Vitriana, N., Agustiawan, A. & Ahyaruddin, M. (2022)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru	Penerapan SIPD di BPKAD Pekanbaru menggantikan SIPKD dan memberikan kemudahan input data keuangan. Namun pencairan insentif PNS dan beberapa fungsi lain masih terkendala oleh sistem yang belum stabil.
3	Pramana, A. C. (2023)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BPKAD Kabupaten Nganjuk	SIPD di BPKAD Nganjuk berdampak positif terhadap akurasi dan kecepatan pelaporan keuangan. Hambatan utama adalah sumber daya manusia yang belum terbiasa dengan sistem berbasis digital.
4	Wibowo, D. A., Sasanti, E. E. & Nurabiah, N. (2023)	Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Proses Penatausahaan Keuangan Daerah	SIPD di Bappeda Kota Mataram mempermudah proses penatausahaan dan perencanaan anggaran daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD

		pada Bappeda Kota Mataram	berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan.
5	Nirmala, D., Iffansyah, & Zakir, M. (2023)	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala	SIPD telah diterapkan pada seluruh OPD di Kab. Donggala termasuk DTPHP, namun SDM belum cukup memadai. Penatausahaan dan pelaporan keuangan melalui SIPD belum berjalan maksimal.
6	Rezkiaty, A. H. (2023)	Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BKAD Kabupaten Bulukumba	Evaluasi menunjukkan SIPD membantu peningkatan kualitas laporan keuangan di BKAD Bulukumba. Namun masih diperlukan peningkatan SDM dan perbaikan infrastruktur jaringan untuk optimalisasi sistem.
7	Arif, R. N. & Firmansyah, A. (2024)	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar	SIPD RI memberikan kemudahan dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Implementasi berjalan cukup baik namun masih menghadapi kendala teknis pada server dan belum meratanya pemahaman pengguna terhadap fitur-fitur sistem.
8	Alfarishi, A. F. & Hartati, S. (2024)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Penerapan SIPD di BPKAD Kota Palembang mampu meningkatkan efisiensi

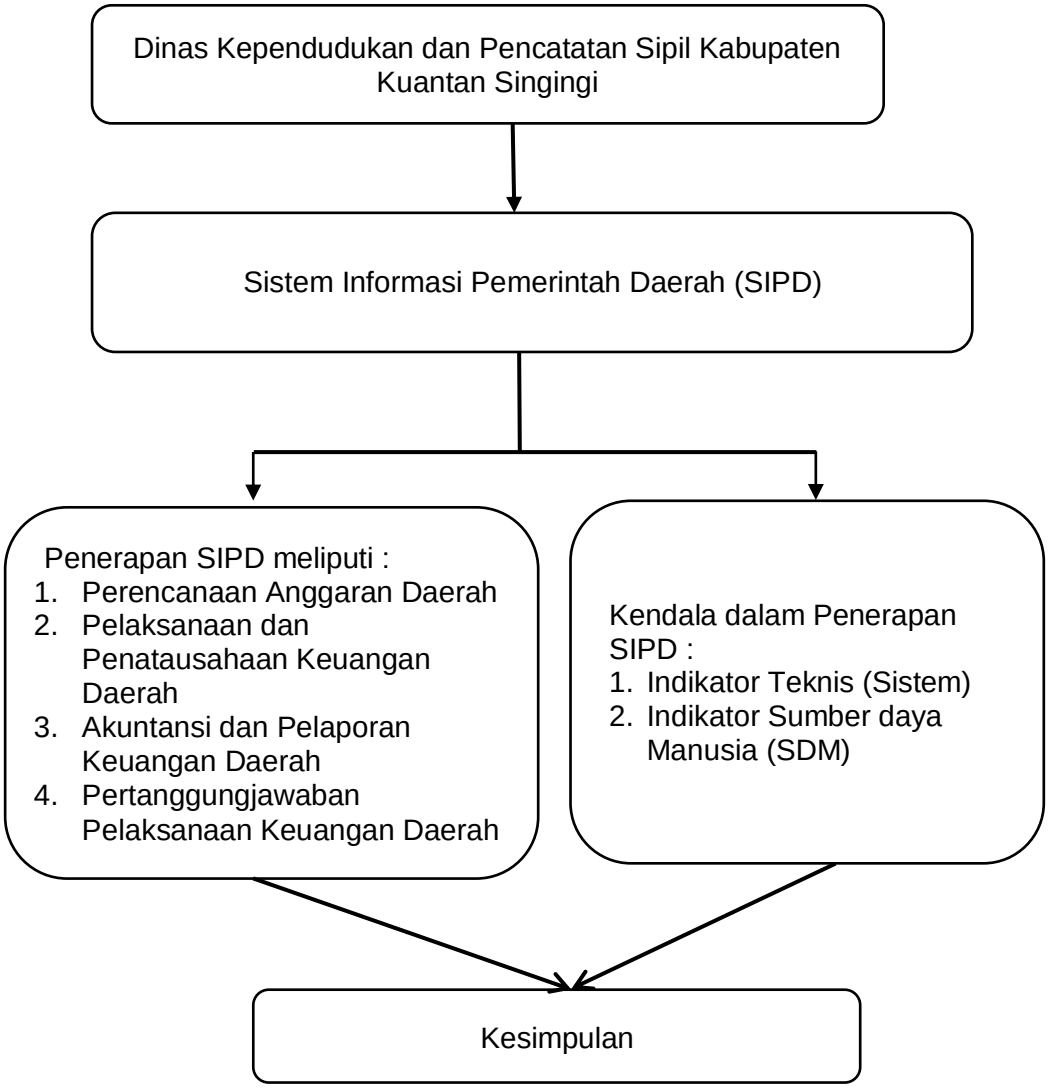
		(SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang	pengelolaan keuangan daerah, meskipun masih terdapat kendala teknis dan keterbatasan kapasitas SDM dalam mengoperasikan sistem.
9	Septiani, D. (2024)	Evaluasi Efektivitas Penggunaan SIPD dalam Penyusunan Anggaran pada Disdukcapil Kab. Batang	Antarmuka SIPD secara umum baik, namun stabilitas server masih bermasalah (sering down). SDM belum sepenuhnya memahami sistem. SIPD membantu transparansi anggaran meski implementasi belum sepenuhnya efektif.
10	Agiltriawan, A., Ilham, M. & Hanif, I. F. (2025)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Instansi Pemerintah Daerah	Penerapan sistem informasi manajemen (termasuk SIPD) pada instansi pemerintah daerah secara umum telah meningkatkan efektivitas pengelolaan data. Tantangan utama mencakup kesiapan infrastruktur, kompetensi SDM, dan koordinasi antar-unit kerja.

2.5 Kerangka Pemikiran

Peneliti akan memberikan gambaran umum terhadap alur pemikiran penelitian agar lebih jelas dan terarah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: *Zulfikar Fikri Amri (2022).*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena fokusnya adalah memahami secara mendalam bagaimana penerapan SIPD Keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi berlangsung dalam praktik sehari-hari. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menggali pengalaman, persepsi, dan realita pelaksanaan SIPD berdasarkan pandangan para pihak yang terlibat, terutama pegawai dan pengguna sistem informasi di instansi tersebut. Pendekatan ini dianggap tepat karena konteks sosial dan kebijakan sangat kuat mempengaruhi penggunaan teknologi informasi di pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian kualitatif mampu menjelaskan fenomena kompleks seperti integrasi sistem informasi, hambatan teknis, hingga persepsi pengguna tentang manfaat sistem (misalnya kemudahan pengolahan data dan akurasi informasi) dalam operasional SIPD.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai objek utama studi.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di bulan Des 2025 sampai dengan Sept 2026, adapun jadwal kegiatan penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Bulan									
		Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ags 2026	Sep 2026
1	Penyusunan Proposal										
2	Proposal Diterima										
3	Bimbingan Proposal										
4	Seminar Proposal										
5	Revisi Proposal										
6	Pengumpulan Data										
7	Bimbingan Skripsi										
8	Ujian Skripsi										

Sumber : Peneliti, 2026

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus penelitian. Menurut Indriantoro dan Supomo (2018:112), populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seleruh pegawai Dinas Kependududukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 87 orang yang terdiri dari 20 orang PNS dan 67 orang PPPK.

3.3.2 Sampel

Untuk menentukan sampel, penelitiian ini menggunakan teknik purposive sampling. Yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai

dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua pegawai memiliki pengetahuan dan keterlibatan secara langsung dalam penerapan Sistem Infomasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Disdukcapil kabupaten kuantan singingi yang memiliki keterlibatan secara langsung dalam penerapan SIPD yang berjumlah 4 orang yang meliputi :

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

No	Jabatan	Nip	Nama
1.	Perencana Ahli Muda	198111212008012019	NOPA SRIWANI, SE
2.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	198009252005011007	TEKAD KURNIAWAN,S.ST
3.	Kabid Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan	97202112001121004	YASRIZON,S.Sos
4.	Kasubbag Keuangan	198005212006042005	RATNA WILIS, SE

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi serta dokumentasi/arsip perusahaan berupa gambaran umum, struktur organisasi dan Job Description.

3.4.2 Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan hasil wawancara Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Perencana Ahli Muda, Kasubbag Keuangan Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi dengan total 4orang.

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi serta data yang relevan dengan topik riset.

2. Data Sekunder

   Data yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi, literatur akademik, hasil penelitian sebelumnya, serta regulasi terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik :

1. **Wawancara Semi-Terstruktur**

   Wawancara dilakukan dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya mereka yang memahami dan menjalankan SIPD. Wawancara bersifat terbuka agar responden bebas menjelaskan pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi.

2. **Observasi**

   Peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas penggunaan SIPD, baik saat input data, pemrosesan informasi, atau penyajian laporan.

3. **Dokumentasi**

   Peneliti mengumpulkan dokumen internal, seperti SOP penggunaan SIPD, laporan instansi, panduan teknis, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penerapan SIPD.

4. **Studi Pustaka**

   Peneliti melakukan telaah literatur terhadap jurnal ilmiah dan referensi akademik untuk memperkuat kerangka teori dan pembahasan dalam penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Reduksi Data**

   Menyederhanakan data lapangan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadi bentuk yang lebih ringkas namun utuh maknanya.

2. **Penyajian Data**

   Mengelompokkan data ke dalam tema-tema penting yang berkaitan dengan tujuan penelitian, misalnya persepsi pengguna terhadap SIPD, tingkat efektivitas penggunaan, serta kendala yang ditemukan.

3. **Penarikan Kesimpulan**

   Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan pola dan hubungan antar tema yang muncul dari data.

Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan gambaran nyata penerapan SIPD secara komprehensif dan kontekstual, tidak sekadar numerik tetapi juga pengalaman dan penilaian para pengguna sistem.

3.7 Pengecekkan Validasi Data

Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber (misalnya wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur). Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak bias dan relevan dengan realitas di lapangan.

Teknik ini sudah banyak digunakan dalam penelitian kualitatif pada studi sistem informasi pemerintahan untuk meningkatkan kredibilitas temuan.

3.8 Tahap-tahap Penelitan

Adapun tahap-tahap penelitian ini secara garis besar adalah:

1. **Persiapan Penelitian**

   Penyusunan proposal, pengajuan izin penelitian ke instansi terkait, serta koordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. **Studi Literatur dan Kerangka Teoretis**

   Mengumpulkan referensi ilmiah dan membuat landasan teori untuk memperkuat konsep penelitian.

3. **Pengumpulan Data Lapangan**

   Melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen yang diperlukan.

4. **Analisis Data**

   Mengolah data yang telah dikumpulkan sesuai dengan teknik analisis yang sudah direncanakan.

5. **Validasi dan Triangulasi**

   Membandingkan dan mengecek keakuratan data melalui triangulasi.

6. **Penyusunan Laporan Akhir**

   Menyusun laporan penelitian berupa skripsi yang sistematis dan logis.

Tahapan ini dirancang agar penelitian berjalan secara sistematis, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran jernih tentang bagaimana SIPD diterapkan serta rekomendasi yang berguna bagi pengembangan sistem di masa depan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, maka kesimpulan penelitian ini disusun sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan SIPD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil meliputi empat aspek, aspek yang pertama perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, serta pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah. SIPD membuat proses pengelolaan anggaran lebih terarah dan data lebih mudah ditelusuri dibandingkan sebelum menggunakan SIPD.SIPD telah digunakan dalam proses pengelolaan keuangan, mulai dari penyusunan, penginputan, pemeriksaan, perubahan anggaran, hingga pencairan dan pertanggungjawaban.
2. Kendala dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Keuangan meliputi penyesuaian pegawai dalam memahami sistem, kesalahan penginputan, kebutuhan pemeriksaan dan koreksi data, perubahan anggaran, serta kendala teknis ketika sistem mengalami gangguan. Kendala tersebut dapat menghambat proses pengelolaan keuangan sehingga diperlukan ketelitian, koordinasi antarbagian, kelengkapan dokumen, dan kemampuan pegawai dalam menggunakan SIPD.

5.2 Saran

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam penggunaan SIPD Keuangan melalui pendampingan atau pelatihan secara berkala agar proses penginputan, perubahan, dan pemeriksaan data dapat dilakukan dengan lebih baik.
2. Bagi pegawai pengelola SIPD Keuangan, diharapkan lebih teliti dalam menyiapkan dan menginput data serta melakukan pemeriksaan kembali sebelum data diproses untuk mengurangi kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai SIPD Keuangan dengan membahas aspek lain, seperti efektivitas, kualitas sistem, atau pengaruh SIPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arya, S. (2022). Sistem Informasi dan Penerapannya pada Organisasi.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

Jogiyanto Hartono. (2017). Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta: Andi Offset.

Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Saa'dillah. (2016). Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen.

Sri Yuli Yulianti. (2019). Pengantar Sistem Informasi.

Tata Sutabri. (2016). Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Andi Offset.

B. Jurnal dan Hasil Penelitian

A. C. Pramana. (2023).Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BPKAD Kabupaten Nganjuk.

A. H. Rezkiaty. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BKAD Kabupaten Bulukumba.

Agiltriawan, A., Ilham, M., dan Hanif, I. F. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Instansi Pemerintah Daerah.

Alfarishi, A. F. dan Hartati, S. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang.

Amri, Z. F. (2022). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan di kecamatan (Studi kasus Kecamatan Semarang Timur)*.

Aulia, R. N. (2023). *Penerapan sistem informasi manajemen pada pemerintah daerah*.

Dione dan Utami. (2020). Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Mendukung Pembangunan Daerah.

Dwi Agus Wibowo, Endar Erawati Sasanti, dan Nurabiah. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap Proses Penatausahaan Keuangan Daerah pada Bappeda Kota Mataram.

Irmayani, N. (2017). *Sistem informasi manajemen pada pengelolaan keuangan daerah*.

Nafischa, E. N. (2021). *Efektivitas penerapan sistem informasi terhadap kualitas informasi dan laporan keuangan*.

Nirmala, D., Iffansyah, & Zakir, M. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala*.

Pramana. (2023). *[Penelitian mengenai penerapan SIPD dan akurasi serta kecepatan pelaporan keuangan]*.

Septiani, D. (2024). *Evaluasi efektivitas penggunaan SIPD dalam penyusunan anggaran pada Disdukcapil Kabupaten Batang*.

Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). *Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru*.

Wibowo, D. A., Sasanti, E. E., & Nurabiah. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap proses penatausahaan keuangan daerah pada Bappeda Kota Mataram*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Lampiran 1. Dokumentasi







Daftar Wawancara

1. Bagaimana awal mula penerapan SIPD Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa alasan utama Dinas beralih atau menggunakan SIPD Keuangan dalam pengelolaan keuangan?
3. Bagaimana tahapan penerapan SIPD Keuangan dari awal sampai dapat digunakan dalam kegiatan keuangan?
4. Siapa saja yang mempunyai peran dalam pengelolaan SIPD Keuangan?
5. Bagaimana pembagian kewenangan antara PA/KPA, PPTK, bendahara, operator, dan pihak terkait dalam SIPD Keuangan?
6. Bagaimana proses penginputan anggaran ke dalam SIPD?
7. Bagaimana proses pemeriksaan dan verifikasi data sebelum data keuangan diproses?
8. Bagaimana proses perubahan anggaran apabila terdapat perubahan kegiatan atau kebutuhan belanja?
9. Bagaimana keterkaitan SIPD Keuangan dengan proses pencairan dan pertanggung jawaban anggaran?
10. Bagaimana proses penyusunan anggaran dilakukan melalui SIPD Keuangan?
11. Bagaimana program dan kegiatan Dinas dimasukkan ke dalam SIPD?
12. Bagaimana cara memastikan anggaran yang diinput sesuai dengan kebutuhan dan dokumen perencanaan?
13. Apakah SIPD membantu mengurangi kesalahan dalam penginputan anggaran?
14. Bagaimana proses koreksi apabila terdapat kesalahan dalam penginputan anggaran?

15. Apakah terdapat kendala ketika melakukan perubahan atau penyesuaian anggaran?
16. Bagaimana proses verifikasi anggaran sebelum disahkan?
17. Apakah penggunaan SIPD membuat proses penganggaran lebih mudah dibandingkan sebelumnya?

Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR:137/Kpts/FIS/UNIKS/XI/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) AKUNTANSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Akuntansi Universitas Islam KuantanSingingi.
2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, tekhnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menunjuk :
   a. Nama : Diskhamarzaweny, SE., MM sebagai pembimbing I
   b. Nama : Yeni Sapridawati, SE., S.Ak sebagai pembimbing II

   Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :
   Nama : Lisa Pratiwi
   NPM : 220412014
   Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Dearah (SIMDA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kuantan Singingi
2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Akuntansi dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Akuntansi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 05 NOVEMBER 2025
Dekan,

SARJAN M, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1008128002

Tembusan :
1. *Ketua Program Studi Akuntansi*
2. *Mahasiswa*
3. *Arsip*

Lampiran 3. Surat Balasan Riset

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Telp/Fax.(0760) 561629 Kode Pos 29362 E-Mail : *disdukcapil@kuansing.go.id*
TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN
Nomor: 400.7.22.1/Disdukpencapil-Sekr/175

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa:

NAMA	**: LISA PRATIWI**
NIM	**: 220412014**
JURUSAN	**: AKUNTANSI**
FAKULTAS	**: ILMU SOSIAL**
JENJANG PENDIDIKAN	**: S1**

Nama tersebut diatas telah melakukan kegiatan riset/pra riset tentang judul penelitian yaitu **"ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"** mulai tanggal 05 Mei 2026 Sampai dengan 05 Agustus 2026.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Teluk Kuantan, 18 September 2026

An.KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

DIAN ENGGRIANI, S.Sos
NIP. 19761113 201001 2 006

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4. Catatan Bimbingan Proposal dan Skripsi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	:	LISA PRATIWI
NPM	:	220412014
Pembimbing I	:	Diskhamarzaweny, SE., MM
Pembimbing II	:	Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
Judul skripsi	:	Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen SIMDA Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1.	20/1-2026	Revisi bab I sesuai saran		
2.	6/3-2026	Revisi bab II - III sesuai saran		
3.	14/4-2026	Revisi bab III sesuai saran		
4.	23/4-2026	ACC utk Seminar Proposal		
5.	21/5-2026	ACC utk Seminar Proposal		
6.	21/5 2026	Perbaiki daftar isi Perbaiki spasi latar belakang lihat di proposal		
7.	17/6 2026	Perbaiki penulisan Perbaiki spasi		
8.	18/6 2026	Acc Seminar proposal		

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
NIDN. 1011019002

Dipindai dengan CamScanner

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Lisa pratiwi
NPM : 220412014
PEMBIMBING 1 : Diskhamarzaweny, SE.,MM
PEMBIMBING 2 : Yeni Sapridawati, SE., M. AK
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tanggal /Bulan/ Tahun	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing 1	Paraf Pembimbing 2
1.	10/9-2026	Revisi bab III dan IV Segera Saran		
2.	14/9-2026	Revisi Hasil Penelitian dan Pembahasan Segera Saran		
3.	16/9 2026	Perbaiki daftar isi perbaik penulisan, jenis huruf perbaiki daftar pustaka		
4.	17/09 2026	Acc ujian Skripsi		
5.				

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

YENI SAPRIDAWATI, SE., M.AK
NIDN. 1011019002

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5. Lembar Persetujuan Pembimbing untuk revisi Proposal

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 12

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Lisa Pratiwi**
NPM : 220412014
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Hari/Tgl Ujian : Jum'at / 19 Juni 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rina Andriani, SE.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Yul Emri Yulis, SE., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Yeni Sepridawati, SE.,M.Ak	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

Lampiran 6. Lembar Persetujuan Pembimbing untuk revisi Skripsi

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Lisa Pratiwi**

NPM : 220412014

Program Studi : Akuntansi

Judul : Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Hari/Tgl Ujian : Senin / 21 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Irwan, SE.,MM	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Yeni Sepridawati, SE.,M.Ak	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Rina Andriani, SE.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp 0760-561655 Fax 0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 8 Mei 2026

No : 121/FIS/UNIKS/PMH/V/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohona Pra Riset

Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi - Teluk Kuantan
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Lisa Pratiwi
NPM	: 220412014
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VIII (Delapan)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian	: Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Derah (SIPD) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
Lokasi Penelitian	: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan kiranya memberi izin penelitian,wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan FIS

SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsp.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 160/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:121/FIS/UNIKS/PMH/V/2026 Tanggal 8 MEI 2026.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	**LISA PRATIWI**
NIM	:	220412014
Jurusan	:	AKUNTANSI FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	TELUK KUANTAN
Judul Penelitian	:	"ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 12 Mei 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

I.Identitas Diri



1. Nama : Lisa Pratiwi
2. Ttl : Batam, 01 Januari 2004
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Rumah : Siberakun
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Nomor HP : 0812-9043-3084
8. Alamat email : lisapratiwi0101@gmail.com

II.Riwayat Pendidikan : -

1. Tahun 2010-2016 SDN 026 Siberakun
2. Tahun 2016-2019 SMPN 1 BENAI
3. Tahun 2019-2022 SMA N 1 BENAI

III.Riwayat Prestasi :

1. SDN 026 Siberakun, selalu masuk peringkat 5 besar
2. SMPN 1 Benai, selalu masuk peringkat 10 besar
3. SMA N 1 Benai, selalu masuk peringkat 15 besar

IV.Pengalaman

1. Magang Di Kantor Disdukcapil Kuansing Bulan Juli s/d September 2025.